

Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: usawatunhasanah@uinsu.ac.id

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: asmuni@uinsu.ac.id

Mhd. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Abstrak: Mashalih Al-Mursalah merupakan konsep metodologis penting dalam pengembangan hukum Islam yang seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Kompleksitas penggunaan metode ini dalam menetapkan hukum Islam kontemporer membutuhkan kajian mendalam untuk memahami kedudukan dan signifikansinya sebagai salah satu dalil hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Mashalih Al-Mursalah dalam kerangka metodologi hukum Islam dan mengevaluasi relevansi Mashalih Al-Mursalah dalam menjawab tantangan hukum modern. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif-filosofis melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder dari literatur ushul fiqh, kitab klasik, dan referensi kontemporer. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, induktif-deduktif, dan hermeneutik untuk menginterpretasikan konsep Mashalih Al-Mursalah secara komprehensif. Hasil penelitian menemukan bahwa mashalih al - mursalah memiliki kedudukan yang signifikan sebagai dalil hukum dengan catatan mashalih al - mursalah dapat digunakan untuk menetapkan hukum dalam konteks yang tidak memiliki landasan tekstual langsung dari Alquran dan Hadis serta memiliki peran strategis dalam mengakomodasi perkembangan hukum Islam sesuai dengan perubahan sosial dan konteks kekinian.

Kata Kunci: Mashalih al-Mursalah, Dalil Hukum, Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Dalam studi ilmu usul fikih, *masalah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru¹ yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam *Alquran* dan *as-Sunnah*,² baik

¹ Di samping melalui masalah mursalah, menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru dapat melalui qiyas, istihsan, sad az-zari'ah. Husain Hamid Hassan, *Na'ariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (al-Qahirah: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).

² Pada awalnya, Muhammadiyah menggunakan istilah Alquran dan as-Sunnah ash-Shahihah untuk menyebut sumber hukum Islam. Pada tahun 1989, istilah as-Sunnah ash-Shahihah

diterima maupun ditolak. Secara embrional, gagasan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.

Dengan wafatnya Nabi, secara serta merta wahyu telah berhenti dan sekaligus sunnah Nabi sebagai rujukan setelah *Alquran* telah berakhir pula. Pada saat yang sama permasalahan terus muncul seiring dengan perjalanan waktu yang terus bergulir. Ketika Nabi masih hidup, segala permasalahan yang muncul dapat dikonfirmasi kepada Nabi.

Untuk menetapkan permasalahan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam *Alquran* dan *as-Sunnah* tersebut, para ulama usul fikih menetapkannya dengan *masalah mursalah* sebagai salah satu dalil hukum untuk penetapan hukum meskipun sebagian ulama ada yang menolak keabsahannya.

Kedudukan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dalam Islam merupakan topik yang penting dalam kajian hukum Islam, terutama dalam konteks penetapan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. *Masalah mursalah* merujuk pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (teks) *Alquran* atau Hadis, tetapi dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan umat.

Para ulama sepakat bahwa *masalah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada. Dalam hal ini, *masalah mursalah* berfungsi untuk menjaga tujuan utama syariah, yaitu kemaslahatan umat manusia.³

Masalah mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu fiqh yang merujuk pada kebijakan atau tindakan yang diambil demi kebaikan masyarakat, tanpa adanya dalil syar'i yang eksplisit. Dalam konteks ini, *masalah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti bebas atau tidak terikat.

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah, dan berfungsi untuk menjaga kepentingan umum. Dalam makalah ini, kita akan membahas kedudukan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, pandangan ulama, serta relevansi dan implementasinya di masa kini dan akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, pandangan ulama terhadap konsep ini, serta relevansinya dalam konteks modern dan masa mendatang.

diganti dengan *as-Sunnah al-Maqbûlah*. Revisi atas istilah ini memiliki maksud bahwa *as-Sunnah al-Maqbûlah* mencakup hadis mutawatir, sahih dan hasan. Istilah *as-Sunnah al-Maqbûlah* diputuskan pada Munas Majelis Tarjih ke-XXIV di Malang, tahun 1989.

³ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), h.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-filosofis, yang fokus pada analisis konseptual dan teoretis terhadap Mashalih Al-Mursalah sebagai dalil hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif-filosofis melalui studi kepustakaan. dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari literatur ushul fiqh, bersifat deskriptif-analitis. Menganalisis metode penetapan hukum Islam. Sumber data primer yang digunakan Kitab-kitab ushul fiqh klasik, sumber data sekunder literatur modern hukum Islam, artikel akademik, penelitian kontemporer terkait Mashalih Al-Mursalah. Teknik Analisis Data menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode induktif-deduktif. Melakukan analisis isi terhadap literatur yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan mashalih al mursalah dalam penetapan hukum Islam, serta relevansinya dengan konteks masalah-masalah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum

Mashalih al-Mursalah berfungsi sebagai metode penting dalam penentuan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama. Dengan berfokus pada kemaslahatan umum, metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kontemporer.

Mashalih al-mursalah berarti kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dalam Alquran atau Hadis tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukannya sebagai dalil hukum didasarkan pada maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga lima tujuan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, mashalih al-mursalah berfungsi sebagai alat untuk menjembatani kekosongan hukum.

Konsep Mashalih Al-Mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang memiliki signifikansi penting dalam pengembangan hukum kontemporer. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Mashalih Al-Mursalah didefinisikan sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tekstual spesifik dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam.⁴

Imam Malik adalah salah satu ulama yang sangat mendukung penggunaan mashalih al-mursalah, terutama dalam hukum-hukum yang

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h.84.

berkaitan dengan urusan publik. Sebaliknya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i lebih membatasi penggunaannya karena khawatir akan penyimpangan dari nash.

Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, tetapi dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks kontemporer, penerapan masalah mursalah dapat dilihat dalam berbagai kasus yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks isu-isu kontemporer, mashalih al-mursalah digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan Hadis. Penerapan *Maslahah Mursalah* pada Kasus Kontemporer:

1. Perlindungan Lingkungan

Lingkungan salah satu contoh penerapan masalah mursalah adalah dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, banyak negara Muslim mulai menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan alam. Misalnya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan promosi energi terbarukan dianggap sebagai langkah positif untuk melindungi bumi demi generasi mendatang.⁵

2. Kesehatan Masyarakat

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penerapan masalah mursalah terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal dan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak merupakan langkah-langkah yang diambil demi keselamatan masyarakat meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam syariat mengenai situasi tersebut.⁶

3. Teknologi Keuangan (Fintech)

Penerapan teknologi keuangan (fintech) juga merupakan contoh masalah mursalah yang relevan saat ini. Banyak lembaga keuangan Islam mulai mengadopsi teknologi digital untuk memudahkan transaksi keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional.

⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: A New Interpretation*, (Damaskus: Dar al-Ma'mun, 2017), h. 245.

⁶ Ahmad al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2020), h.132.

Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.⁷

4. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif juga dapat dilihat sebagai penerapan masalah mursalah di mana semua anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Kebijakan pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas adalah langkah positif yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.⁸

Contoh lain dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah, perkawinan anak-anak dibawah umur tidak dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang. Namun ternyata data-data statistik menunjukkan, perkawinan anak-anak banyak membawa akibat perceraian, karena anak-anak belum siap fisik dan mentalnya untuk menghadapi tugas-tugas sebagai suami istri, apalagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Dan perceraian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.⁹

Maka atas dasar kemaslahatan ini, pemerintah dibenarkan melarang perkawinan anak-anak, dan membuat peraturan tentang batas umur bagi calon-calon suami istri, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat 1.¹⁰

Penerapan masalah mursalah dalam konteks kontemporer menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan dan dapat digunakan untuk mengatasi tantangan modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, terdapat beberapa batasan penting tentang penerapan :¹¹

1. Tidak boleh bertentangan dengan maqashid syariah
2. Membutuhkan ketelitian dalam analisis

⁷ Zubair Hasan, *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, (London: Routledge, 2019), h. 78.

⁸ Abdul Rahman al-Sheha, *The Objectives of Islamic Law*, (Riyadh: Dar Al-Farabi, 2018), h. 56.

⁹ Perhatikan surat al-Rum ayat 21 yang artinya " Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ", dan UU Perkawinan No. 1 th 1974 pasal 1.

¹⁰ Drs. Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. II, 1990, h.84.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 756.

3. Memerlukan konsensus para ahli hukum Islam

B. Pandangan Ulama terhadap Mashalih Al-Mursalah

1. Imam Malik

Imam Malik mendukung mashalih al-mursalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Dalam pandangannya, kemaslahatan yang jelas manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi dasar hukum. Hal ini dibahas dalam *Al-Muwatta'*.¹²

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lebih konservatif terhadap mashalih al-mursalah. Dalam *Ar-Risalah* ia menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Beliau khawatir bahwa penggunaan mashalih al-mursalah yang terlalu luas dapat membuka pintu penyimpangan.¹³

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad mengakui mashalih al-mursalah dalam batasan tertentu, terutama untuk kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash.

4. Al-Syatibi mengembangkan konsep maqashid syariah, menekankan bahwa Mashalih Al-Mursalah harus memperhatikan:¹⁴

- a. Maksud umum syariat
- b. Kesesuaian dengan prinsip universal Islam
- c. Pertimbangan kemaslahatan umum

5. Muhammad Said Ramadan al-Buthi menawarkan pendekatan kritis dengan menekankan:¹⁵

- a. Kehati-hatian dalam implementasi
- b. Pentingnya konsensus ulama
- c. Keselarasan dengan maqashid syariah

6. Menurut Ahmad Al-Raysuni dalam "Nazariyyat al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syatibi" (Rabat: Dar al-Aman, 2008), h. 156., Mashalih Al-Mursalah memerlukan:¹⁶

- a. Pemahaman komprehensif maqashid Syariah
- b. Pertimbangan konteks social

¹² Nasrullah dan Imam Malik, *Terjemah Kitab Al – Muwatha'*, (Jakarta: Shahih: 2016), h.321

¹³ Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, Syara Ahmad Muhammad Syakir (Baerut: Darul Kutub al-Ilmiah),h. 202.

¹⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 2006), h. 197.

¹⁵ Muhammad Said Ramadan al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 231

¹⁶ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqashid 'Ind al-Imam al-Syatibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 2008), h. 156.

c. Kehati-hatian intelektual

Para ulama memandang Mashalih Al-Mursalah sebagai instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, dengan catatan memperhatikan prinsip-prinsip fundamental syariat.

C. Relevansi dan Implementasi Mashalih Al-Mursalah di Masa Kini dan Mendatang

Di era modern ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. *Maslahah mursalah* menjadi sangat relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti hukum ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Implementasi *maslahah mursalah* membantu membangun hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman.

Beberapa contoh implementasinya adalah:¹⁷

1. Hukum Keuangan Syariah

Penggunaan mashalih al-mursalah dalam menetapkan aturan perbankan syariah untuk menjaga stabilitas ekonomi umat.

2. Hukum Lingkungan

Fatwa-fatwa terkait pelestarian lingkungan yang didasarkan pada konsep kemaslahatan umum.

3. Teknologi Modern

Penggunaan mashalih al-mursalah dalam menetapkan hukum terkait media sosial, kecerdasan buatan, dan bioteknologi.

Di masa mendatang, mashalih al-mursalah dapat digunakan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan inovasi teknologi. Namun, penggunaannya harus tetap diawasi oleh para ulama untuk memastikan kesesuaian dengan maqashid al-syari'ah.

KESIMPULAN

Mashalih al-mursalah memiliki kedudukan yang penting sebagai dalil hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan kontemporer. Pandangan ulama terhadap konsep ini bervariasi, namun semuanya sepakat bahwa mashalih al-mursalah harus digunakan dengan hati-hati dan tetap sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Dalam konteks modern, mashalih al-mursalah menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam. Mashalih al-Mursalah berfungsi sebagai metode penting dalam penentuan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Al-Ahali, 1990), h. 201.

diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama. Dengan berfokus pada kemaslahatan umum, metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kontemporer. Implementasinya membutuhkan kehati-hatian, kearifan, dan pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman al-Sheha, *The Objectives of Islamic Law*, Riyadh: Dar Al-Farabi, 2018.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Ahmad al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2020.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Kairo: Dar Ibn Affan, 2006.

Husain Hamid Hassan, *Na'ariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: Dar an-Nahdah

al-'Arabiyyah, 1971.

Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, al-Risalah, Syara Ahmad Muhammad Syakir, Baerut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, cet. II, 1990.

Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: A New Interpretation*, Damaskus: Dar al-Ma'mun, 2017.

Nasrullah dan Imam Malik, *Terjemah Kitab Al - Muwatha'*, Jakarta: Shahih: 2016.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

Zubair Hasan, *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, London: Routledge, 2019.